

RENJA

Rencana Kerja
Perubahan (APBD-P)
Tahun 2019



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI
Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

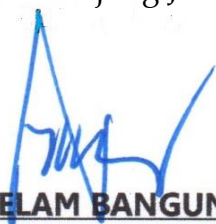
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Program dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini adalah penjabaran dari Rencana Strategi (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Rencana kerja ini merupakan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka pencapaian **Tujuan dan Sasaran Strategis** sebagai upaya merealisasikan **Visi dan Misi** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah gambaran arah kebijakan **Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang akan menjadi acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2019.

Tersusunnya **Rencana Kerja (Renja) Perubahan** diharapkan akan terciptanya perencanaan pembangunan Sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan perkebunan dan peternakan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK** dan **Isu Global** yang menjadi komitmen nasional.

Kuala Tungkal, Juli 2019
Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. MELAM BANGUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 19303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan 1 tahun 2019	10
2.1 Evaluasi dan Review Pelaksanaan Renja SKPD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	24
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif	29
BAB IV. Penutup	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya kemudian dipertegas melalui PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota dalam rangka melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Diperlukan pedoman yang memberikan arahan pembangunan yang hendak dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan diselenggarakan dengan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemajuan material dan spiritual.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Otonomi Daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Untuk itu, diperlukan suatu dokumen perencanaan yang disusun melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1) politik, (2) teknokratik ; (3) partisipatif ; (4) atas bawah (*top - down*); dan (5) bawah - atas (*bottom - up*). Selain itu, perencanaan pembangunan peternakan perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Sehubungan dengan masa berlakunya dokumen perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan (Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat) tahun 2019 masih pelaksanaan, maka demi kesinambungan perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan, perlu segera disusun Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 untuk menggantikan Renja 2019. Dokumen ini memberikan arah, acuan dan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
25. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Perubahan** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan yang dijadikan Rumusan Strategi, Pedoman Arah Kebijakan, Program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014- 2019 serta berbagai aspirasi seluruh stake holder pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan yaitu :

- a. Gambaran tentang kondisi pembangunan perkebunan dan peternakan yang diharapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- b. Acuan aparat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan dan peternakan.
- c. Dasar pengukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan Penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Perubahan** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah untuk efisiensi serta optimalisasi perencanaan pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lebih rinci, tujuan penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Perubahan** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 diarahkan agar dapat:

- a. Perubahan perencanaan;
- b. Mengelola dan memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai;
- c. Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja
- d. Digunakan sebagai pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 terdiri dari 5 (Lima) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1) BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2) BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan 2

Tahun 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan 2 Tahun 2019

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3) BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

4) BAB IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2019

2.1. Evaluasi dan Review Pelaksanaan Renja SKPD.

Kinerja pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan 2 Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
TAHUN 2019

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2019) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab				
					I	II		III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	6.802.244.593	100%	1.633.847.798	100%	1.042.377.648	25%	207.963.507	25%	221.741.107					50%	429.704.614	100%	2.063.552.412	100%	30,34 %	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat	Penyediaan Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	28.744.269	12 bulan	7.591.080	12 bulan	4.050.000	3 bln	855.000	3 bln	946.600					6 bulan	1.801.600	12 bulan	9.392.680	100%	32,68 %	
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	799.165.137	12 bulan	224.617.555	12 bulan	100.680.000	3 bln	17.624.664	3 bln	17.967.506					6 bulan	35.592.170	12 bulan	260.209.725	100%	32,56 %	
3		Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honorarium jasa adm keuangan	12 bulan	683.887.813	12 bulan	278.400.000	12 bulan	173.920.000	3 bln	39.810.000	3 bln	41.170.000					6 bulan	80.980.000	12 bulan	359.380.000	100%	52,55 %	

4		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	128.504.665	12 bulan	49.894.334	12 bulan	22.084.258	3 bln	8.756.684	3 bln	3.750.000				6 bulan	12.506.684	12 bulan	62.401.018	100%	48,56 %
5		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya atk kantor	12 bulan	699.322.223	12 bulan	246.527.205	12 bulan	85.010.392	3 bln	19.260.034	3 bln	12.512.242				6 bulan	31.772.276	12 bulan	278.299.481	100%	39,80 %
6		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	104.724.656	12 bulan	33.325.000	12 bulan	14.250.000	3 bln	1.675.000	3 bln	1.450.000				6 bulan	3.125.000	12 bulan	36.450.000	100%	34,81 %
7		Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	78.884.087	12 bulan	21.397.350	12 bulan	10.822.998	3 bln	3.838.098	3 bln	31.754.072				6 bulan	35.592.170	12 bulan	56.989.520	100%	72,24 %
8		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	43.860.750	12 bulan	16.640.000	12 bulan	6.000.000	3 bln	0	3 bln	1.900.000				6 bulan	1.900.000	12 bulan	18.540.000	100%	42,27 %
9		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat	12 bulan	161.951.665	12 bulan	15.875.000	12 bulan	25.560.000	3 bln	1.500.000	3 bln	3.170.000				6 bulan	4.670.000	12 bulan	20.545.000	100%	12,69 %
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	3.927.999.328	12 bulan	739.580.274	12 bulan	600.000.000	3 bln	114.644.027	3 bln	107.120.687				6 bulan	221.764.714	12 bulan	961.344.988	100%	24,47 %

II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	100%	1.367.775.626	100%	784.600.776	100%	298.000.000	25%	12.725.747	25%	47.060.741					50%	59.786.488	150%	844.387.264	150%	61,73 %	
1		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan operasional	311 unit	683.887.813	153 unit	438.307.776	48 unit	243.000.000	5 unit	12.725.747	25 unit	47.060.741					30 unit	59.786.488	183 unit	498.094.264	58,71 %	72,83 %	
2		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	275 unit	683.887.813	110 unit	48.770.000	55 unit	49.450.000	39 unit	19.167.000	56 unit	8.450.500					95 unit	27.617.500	205 unit	76.387.500	74,40 %	11,17 %	
3		Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	600%	683.887.813	300%	346.293.000	100%	55.000.000	0%	0	0%	0					0%	0	300%	346.293.000	50,00 %	50,64 %	
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100%	683.887.813	100%	48.470.000	90%	41.800.000	0%	0	88,0%	41.000.000		0	0		88,0 %	41.000.000	100%	89.470.000	100,00 %	13,08 %	
1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	420 stel	683.887.813	281 stel	48.470.000	88 stel	41.800.000	0 stel	0	88 stel	41.000.000					88 bulan	41.000.000	369 bulan	89.470.000	87,86 %	13,08 %	
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan PNS	8700 %	683.887.813	85%	0		10.000.000									0%	0	85%	0	0,98%	0,00%	

1		Pengembangan SDM	jumlah PNS yg mengikuti pelatihan/di klat	22 orang	683.887.813	3 orang	15.000.000	3 orang	10.000.000	0 orang	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	3 orang	15.000.000	13,64 %	2,19%			
V	Meningkatnya promosi dan publikasi hasil produk unggulan perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan	terpenuhinya promosi produk unggulan perkebunan	15 kali	533.411.270	7 kali	241.240.500	2 kali	47.550.000	0	0	6.400.000	0	0	0	0 kali	6.400.000	7 kali	247.640.500	46,67 %	46,43 %	Disbunak		
1		Promosi atas hasil produksi perkebunan dan peternakan	terlaksananya publikasi dan promosi produk unggulan daerah	15 kali	533.411.270	7 kali	241.240.500	2 kali	47.550.000	0	0	6.400.000	0	0	0	0 kali	6.400.000	7 kali	247.640.500	46,67 %	46,43 %	Disbunak		
VI	meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan dan peternakan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan	Kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan dan peternakan	56 KT	6.613.108.500	36 KT	915.817.000	10 KT	310.200.000	0	4.750.000	0	4.470.000	0	0	0	0	0	9.220.000	36 KT	925.037.000	64,29 %	13,99 %	Disbunak
1		Pengadaan Prasarana dan sarana perkebunan	terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkebunan	56 KT	6.613.108.500	36 KT	915.817.000	10 KT	310.200.000	0 KT	4.750.000	0	4.470.000	0	0	0	0	0	9.220.000	36 KT	925.037.000	64,29 %	13,99 %	Disbunak
VII	Meningkatnya produksi komoditi perkebunan dan meningkatnya pengelolaan lahan produktif perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Meningkatnya produksi (ton) dan luas lahan (ha) komoditi kelapa unggulan				2.700.834.750		1.110.230.159		41.155.000		98.153.700		0	0			139.308.700		2.840.143.450	#DIV/0!	Disbunak	

1		Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	luas lahan terairi TAM	673 ha	842.996.754	373 ha	359.809.550	100 ha	96.651.500	0	5.335.000	0	4.800.000				0 ha	10.135.000	373 ha	369.944.550	55,42 %	43,88 %	Disbunak
2		Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom	terpeliharanya kebun kopi percontohan libtukom	25 ha	320.639.590	2 ha	108.740.250	1 ha	45.055.000	0,25 ha	2.700.000	0,25 ha	15.625.000				0,50 ha	18.325.000	3 ha	127.065.250	10,00 %	39,63 %	Disbunak
3		Pembibitan Kelapa Sawit	tersedianya bibit kelapa sawit yang bermutu	55.000 kecam bah	1.884.279.992	25.000 kecam bah	850.185.600	25.000 kecam bah	592.776.400	0	17.820.000	0	13.260.000				0 kecam bah	31.080.000	25.000 kecam bah	881.265.600	45,45 %	46,77 %	Disbunak
4		Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	terlaksananya pencegahan dan pengendalian karhutla dan konflik lahan	78 kecam atan	693.758.130	26 kecam atan	163.586.800	13 Kecamatan	111.430.000	0	4.200.000	0	4.200.000				0 kecam atan	8.400.000	26 kecam atan	171.986.800	33,33 %	24,79 %	Disbunak
5		Pembinaan Lintas Sektoral	pengadaan bantuan lintas sektoral :	10 desa	469.366.681	6 desa	213.878.200	2 desa	48.182.259	0	0	0	23.110.000				0 desa	23.110.000	6 desa	236.988.200	60,00 %	50,49 %	Disbunak
			- Pelatihan Dinamika Kelompok	250 orang		150 orang		50 orang		0		50 orang					50 orang		200 orang		80,00 %		
			- Pengadaan bibit unggul tanaman	5 paket		3 paket		1 paket		0		0					0 paket		3 paket		60,00 %		
			- Pengadaan pupuk dan obatan tanaman	5 paket		3 paket		1 paket		0		0					0 paket		3 paket		60,00 %		

6		Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	teratasinya serangan OPT kebun rakyat	900 ha	632.978.483	506 ha	283.495.000	250 ha	63.900.000	0	4.200.000	0	16.789.000				0 ha	20.989.000	506 ha	304.484.000	56,22 %	48,10 %	Disbunak
7		Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	terlaksananya pengendalian hama penyakit perkebunan	180 lokasi	488.880.737	56 lokasi	288.600.550	30 lokasi	36.520.000	0	4.200.000	9 lokasi	3.100.000				9 lokasi	7.300.000	65 lokasi	295.900.550	36,11 %	60,53 %	Disbunak
8		Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres	terpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entres	54 ha	845.118.073	27 ha	432.538.800	9 ha	115.715.000	2,25 ha	2.700.000	2,25 ha	17.269.700				5 ha	19.969.700	32 ha	452.508.500	58,33 %	53,54 %	Disbunak
VIII	meningkatnya SDM pelaku usaha perkebunan dan peternakan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan	meningkatkan koordinasi antara penyuluh dan instansi terkait	100%	469.378.949	100%	208.410.000	100%	39.984.000	0	9.890.000		4.800.000	0	0		0	14.690.000	100%	223.100.000	100,00%	47,53%	Disbunak
1		Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan / Peternakan	terlaksananya koordinasi penyuluh perkebunan/peternakan	28 kali	469.378.949	16 kali	208.410.000	4 kali	39.984.000		9.890.000		4.800.000				0 kali	14.690.000	16 kali	223.100.000	57,14 %	47,53 %	Disbunak
IX	menurunnya angka kematian ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	menurunnya angka kematian ternak (%)	1,5%	3.312.681.201	1,84%	1.200.110.000	1,7%	435.970.000		30.000.000		44.250.000	0	0	0	0,00%	74.250.000	0,92%	1.274.360.000	61%	38,47%	Disbunak
1		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	jumlah ternak yg terlayani :		2.283.751.764		951.795.000		403.270.000		25.200.000		30.450.000					55.650.000		1.007.445.000	49,99 %	44,11 %	Disbunak

		Ternak	- Pengobatan	12.000 ekor		4.000 ekor	1.500 ekor		171 ekor		517 ekor					688 ekor		4.688		39,07 %		
			- PKB	6.000 ekor		3.000 ekor	1.200 ekor		60 ekor		33 ekor					93 ekor		3.093		51,55 %		
			- Pemeriksaan Spesimen	6.000 ekor		3.000 ekor	800 ekor		138 ekor		0 ekor					138 ekor		3.138		52,30 %		
			- Vaksinasi	15.000 ekor		7.500 ekor	2.500 ekor		116 ekor		938 ekor					1.054 ekor		8.554		57,03 %		
			- Eliminasi	600 ekor		300 ekor	100 ekor		0 ekor		0 ekor					0 ekor		300		50,00 %		
2		Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	terlaksananya pengawasan perdagangan ternak dan pemotongan	72 bulan	492.346.937	36 bulan	248.315.000	12 bulan	32.700.000	4 bln	4 bln	4.800.000				8 bulan	18.600.000	44 bulan	266.915.000	61,11 %	54,21 %	Disbunak
X	meningkatnya produksi daging	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam broiler, ayam buras, itik		10.305.937.712		1.806.176.644		852.552.430			40.315.808		0	0		270.754.808		2.076.931.452		20,15 %	Disbunak
1		Pengembangan Inseminasi Buatan	Jumlah sapi yang di IB	6.000 ekor	1.491.565.693	4.365 ekor	711.675.908	1.500 ekor	165.000.000	427 ekor	346 ekor	30.022.772	32.500.000			773 ekor	62.522.772	5.138 ekor	774.198.680	85,63 %	51,91 %	Disbunak
2		Sinkronisasi Birahi	Jumlah sapi yang disinkronisasi birahi	4.000 ekor	823.382.550	1.964 ekor	385.276.000	500 ekor	65.900.000	0	0	2.400.000	2.400.000			0 ekor	4.800.000	1.964 ekor	390.076.000	49,10 %	47,37 %	Disbunak
3		Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif	terlaksananya pengembangan ternak ruminansia	80%	287.614.641	20%	62.205.000	20%	37.070.000	5%	5%	0	15.670.000			10%	15.670.000	30%	77.875.000	37,50 %	27,08 %	Disbunak

4		Pengembangan Ternak Ruminansia	terlaksananya pengembangan ternak ruminansia	150 ekor	1.076.455.000	20 ekor	207.588.736	33 ekor	383.113.430	0 ekor	7.893.036					0 ekor	9.693.036	20 ekor	217.281.772	13,33 %	20,18 %	Disbunak
5		Penyanga Hari Besar Keagamaan	tersedianya daging konsumsi untuk hari besar keagamaan	4.800 kg	1.100.155.388	2.100 kg	439.431.000	900 kg	201.469.000		0	800 kg				800 kg	178.069.000	2.900 kg	617.500.000	60,42 %	56,13 %	Disbunak
XI	meningkatnya SDM pelaku usaha perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	jumlah kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	20 KT	485.181.053	9 KT	200.685.600	2 KT	28.099.000	0	0	0	0	0	0	0 KT	3.200.000	9 KT	203.885.600	45,00 %	41,36 %	Disbunak
1		Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	terlaksananya pelatihan TTG	20 KT	485.181.053	9 KT	200.685.600	2 KT	28.099.000		0					0 KT	3.200.000	9 KT	203.885.600	45,00 %	42,02 %	Disbunak
XII	meningkatnya SDM pelaku usaha perkebunan dan peternakan	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	meningkatkan kepatuhan dan kerjasama mitraan perusahaan dengan lembaga/asosiasi petani pada komoditi	5 komoditi	1.639.085.021	5 komoditi	684.958.896	5 komoditi	225.733.662		12.567.500			0	0	0 komoditi	38.703.762	5 komoditi	723.662.658	100,00 %	44,15 %	Disbunak
1		Pembinaan Kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan	terbinanya asosiasi dan terjalinnnya kerjasama kemitraan	25 asosiasi	259.768.189	9 asosiasi	101.303.000	5 asosiasi	32.055.000		1.200.000					0 asosiasi	8.725.000	9 asosiasi	110.028.000	36,00 %	42,36 %	Disbunak

2		Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	terlaksananya pelatihan SKE	625 org	441.472.392	250 org	171.481.896	125 org	67.073.662	0 org	2.000.000	25 org	15.011.262				25 org	17.011.262	275 org	188.493.158	44,00 %	42,70 %	Disbunak
3		Pembinaan dan Inventarisasi Kebun Sawit Swadaya	diperolehnya STD-B untuk kebun sawit swadaya	4.500 ha	937.844.439	1.505 ha	412.174.000	700 ha	126.605.000		9.367.500		3.600.000				0 ha	12.967.500	1.505 ha	425.141.500	33,44 %	45,33 %	Disbunak
XIII	tersedianya data dan informasi perkebunan dan peternakan	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya data perkebunan dan peternakan yang valid dan up to date	100%	3.800.448.392	100%	1.658.611.481	100%	431.319.750		35.480.000		102.077.000		0		0	137.557.000		1.796.168.481	0,00%	47,26 %	Disbunak
1		Pengolahan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan	Tersedianya data statistik perkebunan dan peternakan	240 buku	1.069.569.367	120 buku	454.807.700	40 buku	170.655.000		10.980.000		40.145.000				0 buku	51.125.000	120 buku	505.932.700	50,00 %	47,30 %	Disbunak
2		Penyebaran informasi pasar perkebunan	tersedianya dokumen informasi pasar perkebunan	6 dok	454.574.401	2 dok	129.398.750	1 dok	34.789.750		3.600.000		6.200.000				0 dok	9.800.000	2 dok	139.198.750	33,33 %	30,62 %	Disbunak
3		Sinkronisasi program perencanaan dan Perkebunan Peternakan dan pelaporan	tersedianya Dokumen RENJA,RKA dan Dokumen SAKIP	24 dok	501.977.973	17 dok	263.400.240	4 dok	27.680.000		4.800.000		7.200.000				0 dok	12.000.000	17 dok	275.400.240	70,83 %	54,86 %	Disbunak
4		Pengelolaan Ternak Pemerintah	terkelolanya pusat ternak daerah	5 dok	999.406.934	3 dok	456.819.791	1 dok	118.550.000		4.200.000		23.400.000				0 dok	27.600.000	3 dok	484.419.791	60,00 %	48,47 %	Disbunak

5		Penyusunan laporan informasi pasar peternakan	tersedianya dokumen informasi pasar peternakan	6 dok	774.919.717	3 dok	354.185.000	1 dok	79.645.000								0 dok	37.032.000	3 dok	391.217.000	50,00 %	50,48 %	Disbunak
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		58,12 %	39,78 %			
																	Predikat kinerja						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																							

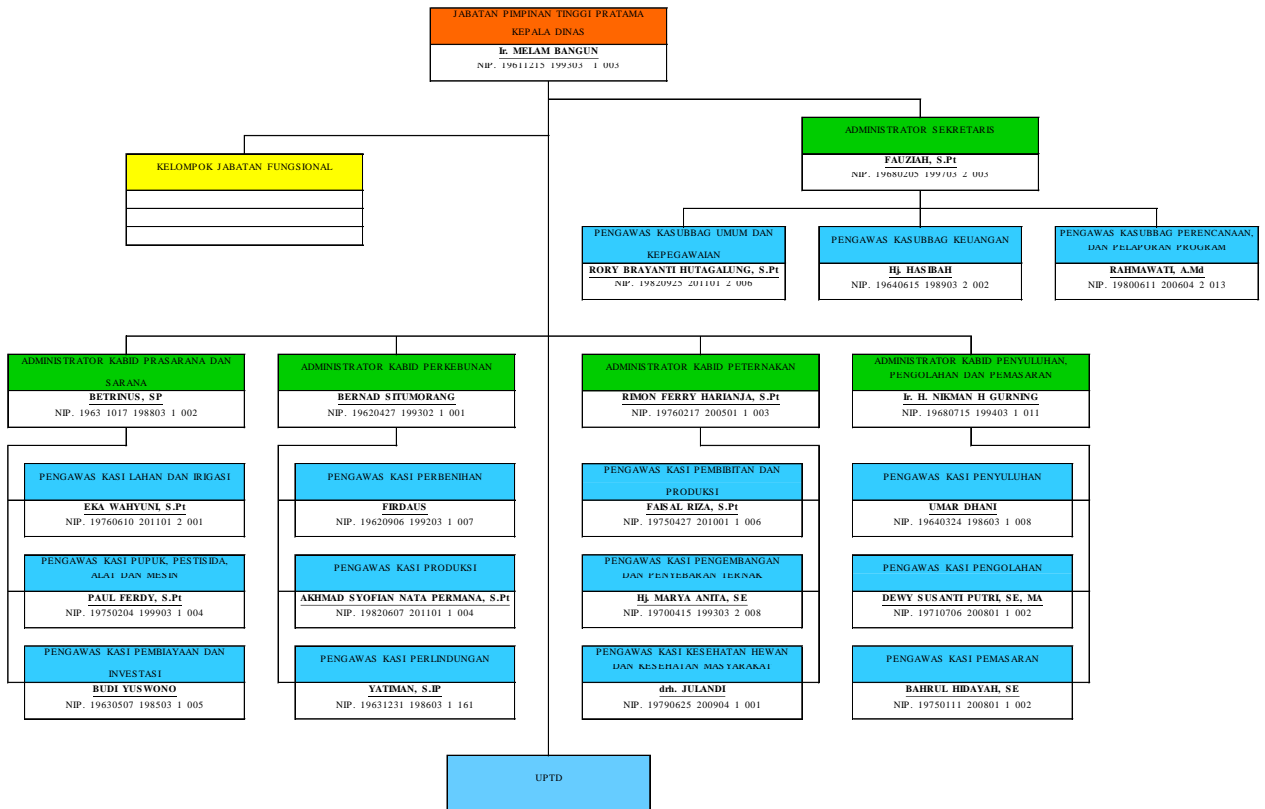
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

**STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**Tabel T-C 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

NO	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi dan Perkiraan Pencapaian		Proyeksi	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bertambahnya Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :											
	- Produksi Sawit			136.535	139.267	142.051	144.893	147.790	151.834*	154.870	156.418	157.168
	- Produksi Karet			4.144	4.913	4.915	4.918	4.921	4.407*	4.495	4.584	4.921
	- Produksi Kelapa			56.941	58.080	59.241	60.428	61.635	53.267*	54.341	55.427	61.635
	- Produksi Kopi			1.263	1.288	1.314	1.340	1.367	1.086*	1.118	1.129	1.367
	- Produksi Pinang			11.432	11.662	11.895	12.133	12.375	9.941*	10.239	10.341	12.375
2	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :											
	- Luas Lahan Sawit			63.833	6.479	65.762	66.749	67.750	68.665*	70.038	71.438	71.938
	- Luas Lahan Karet			9.821	9.826	9.831	9.836	9.841	9.245*	9.337	9.523	9.841
	- Luas Lahan Kelapa			55.183	55.468	55.736	56.014	56.294	55.064*	55.730	56.193	56.294
	- Luas Lahan Kopi			3.119	3.166	3.213	3.262	3.310	2.633*	2.767	2.822	3.310
	- Luas Lahan Pinang			10.484	10.798	11.122	11.456	11.800	11.016*	11.122	11.344	11.600
3	Bertambahnya Produksi Daging Ternak (Kg) :											
	- Produksi Daging Sapi			285.658	291.371	297.199	303.143	309.205	291.470*	300.171	304.355	309.205
	- Produksi Daging Kerbau			12.844	13.101	13.363	13.630	13.903	15.801*	15.801	15.801	13.903

	- Produksi Daging Kambing			27.256	27.801	28.357	28.924	29.503	27.694*	43.212	43.212	29.503
	- Produksi Daging Domba			562	573	584	596	608	804*	593	598	608
	- Produksi Daging Unggas			2.331.966	2.378.606	2.426.179	2.475.444	2.524.952	2.360.367*	4.118.129	4.118.129	4.118.129
4	Bertambahnya Populasi Ternak (Ekor) :											
	- Populasi Sapi			8.389	8.557	8.728	8.902	9.081	8.624*	8.728	8.902	9.081
	- Populasi Kerbau			717	740	771	780	811	728*	771	780	811
	- Populasi Kambing			48.002	48.550	48.910	49.228	49.376	48.054*	48.910	49.228	49.376
	- Populasi Domba			790	816	845	865	890	795*	845	865	890
	- Populasi Unggas			969.095	981.067	1.028.113	1.058.956	1.090.725	1.197.070*	1.215.020	1.233.251	1.272.340

Ket . : * angka sementara

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Visi dan Misi Kepala Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat yang dituang didalam RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan pertimbangan dalam penyusunan Renja. Sebagai mana Visi dan Misi Kab.Tanjung Jabung Barat :

Visi :
*Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas*

KODE	MISI
MISI 1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
MISI 2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
MISI 3	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
MISI 4	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi melalui Misi, dan sesuai dengan Tupoksi maka Dinas Perkebunan dan Peternakan akan mendukung Misi 3 yaitu : “Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan”. Dari aspek kajian Internal dan Eksternal maka Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyelenggaraan pelayanan terdapat beberapa permasalahan beserta faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Rendahnya Produktifitas sektor perkebunan dan peternakan.

Rendahnya produktifitas sektor perkebunan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- (a). Kebun dengan kondisi tua/rusak (TT/TR) cukup luas
- (b). belum optimal penggunaan bibit unggul dan saran produksi lainnya
- (c). kurang tersedia bibit bermutu di masyarakat

- (d) Pengendalian OPT belum dilaksanakan secara terpadu dan ramah lingkungan.
- (e). Gangguan usaha dan konflik perkebunan
- (f) Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan
- (g) Perubahan Iklim

Rendahnya produktifitas Peternakan dipengaruhi oleh :

- (a). Sulitnya mencari bibit unggul ternak
- (b) Pengendalian pnyakit ternak yang masih terbatas
- (c). Pola peternakan yang masih sederhana/tradisionil
- (d). ketersediaan pakan yang masih terbatas dan mahal
- (e) kurangnya tenaga medis
- (f) Kurangnya prasarana dan sarana
- (g) Perubahan Iklim

2. Ketersediaan dan pemamfaatan lahan

Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat dan distribusi yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menyebabkan persaingan dalam penggunaan lahan yang menyebabkan terjadinya konflik. Disisi lain lahan belum dikelola dan diolah secara ekonomis, efektif , efisien dan terintegrasi dengan peternakan sehingga pada gilirannya menyebabkan rendahnya nilai tambah bagi petani. Halhal yang perlu dicermati dengan ketersediaan dan pemamfaatan lahan adalah :

- (a). Penggunaan RTRW sesuai peruntukan
- (b) Komitmen pengusaha yang perlu didukung kebijakan

3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani dan peternak yang dikelola masyarakat yakni rendahnya mutu hasil produksi. Hasil perkebunan masih terkontaminasi oleh kotoran dan benda asing lainnya serta pengeringan yang kurang sempurna. Hal ini menyebabkan harga yang diperoleh petani masih rendah dan sulit diterima di pasaran Internasional. Hal yang perlu dicermati untuk meningkatkan mutu produk dan daya saing antara lain : (a). penanganan pasca panen; (b) pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan. Sedangkan untuk sektor peternakan, untuk meningkatkan produktifitas melalui inseminasi buatan selain itu untuk meningkatkan pendapatan peternak dengan pemanfaatan limbah kotoran ternak.

4. Akses terhadap sumber permodalan

Lemahnya permodalan menyebabkan petani/peternak sulit untuk mengembangkan usahanya sehingga mencari pinjaman kepada pihak lain yang tidak resmi (rentenir) dengan bunga yang sangat tinggi. Meskipun pemerintah telah menggulirkan Program Kredit namun masih terdapat beberapa kendala dari petani untuk mengakses antara lain disebabkan :

- (a) Lemah dalam pemenuhan syarat Administrasi Perbankan
- (b) Resiko agribisnis yang sangat tinggi
- (c) Belum tersedianya lembaga keuangan khusus bagi petani/peternak
- (d) Belum tersedianya lembaga penjamin resiko agribisnis

5. Sumberdaya manusia dan Kelembagaan

Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang menganani perkebunan/peternakan masih terbatas dan kurang memadai ditambah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga menghambat pengembangan kedepan. Masalah kelambagaan juga menjadi perhatian yang sangat serius Karen belum optimalnya kemitraaan antara perusahaan perkebunan besar dengan kelompok petani dan belum sempurnanya infrastruktur pendukung system distribusi dan transportasi.

6. Isu Lingkungan Hidup dan Globalisasi

(a) Perubahan Iklim

Efek rumah kaca yang diakibatkan oleh segala aktivitas manusia dengan menggunakan sumber energy yang bersumber dari alam (fosil) seperti proses industry dan transportasi. Akibat akumulasi dari efek rumah kaca tersebut menyebabkan terjadinya pemanasan global. Perubahan iklim sangat berpengaruh besar terhadap sector perkebunan dan peternakan dari segi produktifitas, dan mutu. Selain itu juga berpengaruh terhadap kerentanan dalam serangan organism pengganggu.

Selain itu dampak perubahan iklim juga mengakibatkan kebakaran hutan dan banjir.

(b) Liberalisasi Pasar.

Isu liberalisasi perdagangan semakin marak setelah disetujuinya GATT/WTO (**World Trade Organization**) oleh 122 negara termasuk Indonesia. Pentingnya perdagangan bebas antar Negara yang disebabkan kesamaan kepentingan, potensi, kebutuhan, hubungan geografis dan tradisi menyebabkan negara mendorong membentuk kelompok/kawasan perdagangan seperti AFTA, NAFTA, APEC, ACFTA. Sebagai bagian dari Negara yang menganut ekonomi terbuka Indonesia harus ikut dan berpartisipasi dalam perdagangan bebas, komitmen tersebut dimanifestasikan kedalam kerjasama seperti AFTA, APEC, ACFTA dan WTO.

Secara umum Negara yang menganut perdagangan liberal adalah menghilangkan secara bertahap hambatan tarif dan sebagai gantinya menerapkan hambatan non tarif dalam mekanisme ekspor-impor. Meskipun hambatan tarif dapat diatasi namun **Agribisnis Indonesia** dihadapi oleh **hambatan teknis** seperti : *Mutu Produk, Isu Lingkungan, Intellectual Property right, HAM dan Ketenagakerjaan.*

2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan terhadap usulan kegiatan yang diminta masyarakat ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat diakomodir seluruhnya karena keterbatasan dana APBD II, untuk dana melalui APBD II berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan melalui musrenbang. Untuk beberapa usulan kegiatan yang tidak terakomodir melalui dana APBD II akan diakomodir melalui dana APBD I dan APBN.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016 - 2021, yakni : *Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat, dan Berkualitas*. Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Misi ke-3, yaitu : "*Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro-industri dan perikanan*", maka pada Tahun 2019, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program pembangunan di bidang perkebunan dan peternakan diantaranya adalah disajikan pada lampiran.

BAB IV

P E N U T U P


Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga apa yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2019 yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, Renja Perubahan digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2019

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Ir. MELAM BANGUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 19303 1 001

LAMPIRAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2019

Urusan
Pemerintah : **2.01.03 - Pertanian**
Organisasi : **2.01.03.02 - Dinas Perkebunan dan Peternakan**

**Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode Program Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah		Bertambah/(berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
01.		Program pelayanan Administrasi Perkantoran				1.042.377.648	1.072.377.648	30.000.000	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 Bulan		4.050.000	3.450.000	(600.000)	14,81%
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 Bulan		100.680.000	100.680.000	-	0%
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 bulan		173.920.000	204.520.000	30.600.000	17,59%

Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2019

08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan	100%		22.084.258	22.084.258		0%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 bulan		85.010.392	85.010.392		0%
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 bulan		14.250.000	14.250.000		0%
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 Bulan		10.822.998	10.822.998		0%
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 Bulan		6.000.000	6.000.000		0%
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 Bulan		25.560.000	25.560.000		0%
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 Bulan		600.000.000	600.000.000		0%

Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2019

02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				347.450.000	376.250.000	28.800.000	
	12	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2 unit printer, 2 unit laptop, 1 unit komputer desktop		-	47.200.000	47.200.000	100%
	20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2 unit, 1 Unit		55.000.000	5.000.000	(10.000.000)	18,18%
	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perkebunan dan Peternakan	48 unit		243.000.000	234.600.000	(8.400.000)	(3,46)%
	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perkebunan dan Peternakan	56 unit		49.450.000	49.450.000	-	0%
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				41.800.000	41.800.000	-	
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	47 stel, 35 stel, 6 stel		41.800.000	41.800.000	-	0%
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000	10.000.000	-	

	05.	Pengembangan SDM	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3 orang		10.000.000	10.000.000	-	0%
17.		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				47.550.000	47.550.000	-	
	18.	Promosi atas hasil produksi perkebunan	Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir	2 kali		47.550.000	47.550.000	-	0%
18.		Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan				310.200.000	310.200.000	-	
	08.	Pengadaan prasarana dan sarana perkebunan	Kab.Tanjab Barat	Seng 100 kodi, mesin pengupas kopi basah 2 unit, mesin pengupas kopi kering 2 unit, rehab kandang 1 paket		310.200.000	310.200.000	-	0%
19.		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				1.110.230.159	1.441.767.659	331.537.500	
	08	Pembinaan Lintas Sektoral	Desa Mekar Alam Kec. Seberang kota dan Desa Tungkal 1 Kec. Tungkal Ilir	50 org, 2 paket, 1 paket		48.182.259	48.182.259	-	0%

Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2019

09	Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	13 Kecamatan Kab.Tanjab Barat	1 kali, 30 lokasi, 11.900 batang bibit kopi, 5.000 kg pupuk tablet		36.520.000	193.332.500	156.812.500	429%
10	Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	13 Kecamatan			111.430.000	111.430.000	-	0%
11	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	KT Karya Jaya II dan KT Sido Lestari Ds. Mekar Alam Kec. Seberang Kota. KT Sido Muncul Ds. Harapan Jaya Kec. Seberang Kota. KT Parit Jawa Ds. Pantai Gading dan KT Subur Makmur Ds. Kemuning Kec. Bram Itam	100 ha, 5 kelompok tani		96.651.500	96.651.500	-	0%
12	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres	Desa Tanjung Paku Kec. Merlung	9 ha		115.715.000	115.715.000	-	0%

Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2019

	13	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	13 Kecamatan Kab.Tanjab Barat	250 ha		63.900.000	63.900.000	-	0%
	15	Pemeliharaan Lanjutan kebun Percontohan Kopi Libtukom	Desa Bunga Tanjung Kec. Betara	1 ha		45.055.000	45.055.000	-	0%
	25	Pembibitan Kelapa Sawit	Kec. Betara Desa Terjun Gajah	25.000 kecambah		592.776.400	767.501.400	174.725.000	29%
01.		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				39.984.000	39.984.000	-	
	04	Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	13 Kecamatan Kab.Tanjab Barat	4 kali		39.984.000	39.984.000	-	0%
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				435.970.000	493.760.000	57.790.000	
	01.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	13 Kecamatan Kab.Tanjab Barat	13 kecamatan		403.270.000	461.060.000	57.790.000	14%
	02.	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Kab.Tanjab Barat	12 bulan		32.700.000	32.700.000	-	0%
22.		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				2.306.752.430	5.064.485.871	2.757.733.441	

	10	Pengendalian Pomotongan Ternak Betina Produktif	Kab.Tanjab Barat	1 kali		37.070.000	37.070.000	-	0%
	11	Sinkronisasi Birahi	Kab.Tanjab Barat	750 ekor, 2.000 ekor		65.900.000	65.646.500	(253.500)	-0,38%
	12	Pemeliharaan Sapi Bakalan	Kec. Bram Itam	10 ekor		169.200.000	191.026.300	21.826.300	13%
	13	Pengembangan Inseminasi Buatan	Kab.Tanjab Barat	1.500 ekor		165.000.000	165.000.000	-	
	14	Penyanggaa hari Besar keagamaan	Kab.Tanjab Barat	9 ekor		201.469.000	201.469.000	-	0%
	15	Pengembangan Ternak Ruminansia	Kec. Renah Mendaluh, Pengabuan, Tungkal Ilir, Muara Papalik	200 ekor		383.113.430	3.119.274.071	2.726.160.641	714,19%
	17	Pembangunan Sumber Air Bersih dan Perbaikan Puskesmas (DAK)	Kab.Tanjab Barat	1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 uni, 1 unit, 1 unit, 2 paket, 2 paket		1.285.000.000	1.285.000.000	-	0%
24.		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				28.099.000	28.099.000	-	
	05	Pelatihan teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab.Tanjab Barat	1 kali		28.099.000	28.099.000	-	0%

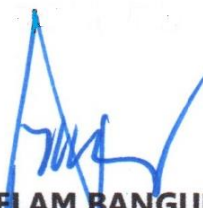
Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2019

24.		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				225.733.662	269.761.745	44.028.083	
	01.	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	Kec. Pengabuan, Senyerang, Batang Asam, Tebing Tinggi	4 kecamatan		126.605.000	170.633.083	44.028.083	34,78%
	02.	Pelatihan pemberdayaan petani sistem kebersamaan ekonomi (SKE)	Kab.Tanjab Barat	125 orang		67.073.662	67.073.662	-	0%
	03.	Pembinaan Kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan	Kab.Tanjab Barat	5 Asosiasi		32.055.000	32.055.000	-	0%
29.		Program Pengembangan Data/Informasi Perkebunan				431.319.750	409.719.750	(21.600.000)	
	01.	Penyusunan laporan informasi pasar peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat	12 bulan		79.645.000	76.645.000	(3.000.000)	-3,77%
	02.	Pengolahan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan	13 Kecamatan Kab.Tanjab Barat	20 dokumen		170.655.000	152.055.000	(18.600.000)	-11%
	03.	Pengolahan Ternak Pemerintah	13 Kecamatan Kabupaten Tanjung	138 ekor		118.550.000	118.550.000	-	0%

Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2019

04.	Sinkronisasi program perencanaan perkebunan peternakan dan Pelaporan	Jabung Barat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat	6 dokumen		27.680.000	27.680.000	-	0%
05.	Penyebaran Informasi Pasar Perkebunan	Kab.Tanjab Barat	12 kali		34.789.750	34.789.750	-	0%
					6.377.466.649	9.605.755.673	3.228.289.024	50,62%

Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Ir. MELAM BANGUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 19303 1 001